

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN
(Studi Kasus Pemanfaatan Website Desa Di Kabupaten Bojonegoro)

Anik Mustika Rahayu

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

anikrahayu@mhs.unesa.ac.id

Gilang Gusti Aji

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

gilangaji@unesa.ac.id

Abstrak

Kebijakan keterbukaan informasi publik dalam konteks masyarakat desa merupakan gagasan yang lahir untuk menghubungkan fungsi pengelolaan data dan informasi secara utuh dalam ruang lingkup pemerintahan desa. Dimana setiap informasi yang dimuat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendorong pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) salah satunya dalam bentuk *Website* Desa (*WebDes*). *Website* desa merupakan fasilitas jaringan yang berpadu dengan teknologi informasi sebagai media informasi publik untuk mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penerapan kebijakan *website* desa dari total 419 desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro hanya 102 desa yang aktif. Sedangkan disisi lain pemerintah Kabupaten Bojonegoro tetap melaksanakan kebijakan agar diimplementasikan semua desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Dalam konteks keterbukaan informasi melalui *website* desa belum ada satu pemahaman antara pemerintah Kabupaten dan Pemerintah desa. Hal ini tentunya menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan terkait urgensi kebijakan. Bagi pemerintah desa yang tidak mengimplementasikan kebijakan *website* mayoritas yang menjadi hambatan mereka adalah sumber daya manusia dan anggaran. Selain itu setiap pemerintah desa memiliki permasalahan masing-masing seperti infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan. Beberapa desa yang ada di kabupaten Bojonegoro tidak menganggarkan dana untuk implementasi *website* desa karena memiliki fokus pembangunan yang ingin dicapai.

Kata Kunci: *Website* desa, Keterbukaan Informasi Publik, Kabupaten Bojonegoro

Abstract

The destruction of public information disclosure in the context of village society is an idea that was born to connect the whole data and information management function within the scope of village administration Where every information that is related to village government administration Bojonegoro District Government encourages the development of a Village Information System (SID) one of them in the form of a Village Website (WebDes). Village website is a network facility that is integrated with information technology as a media to inform the public to support the governance process. In implementing village website policies from a total of 419 villages in Bojonegoro only 102 villages remain implement policies so that all existing villages are implemented in Bojonegoro district In the context of information disclosure through the village website there is not yet one understanding between the district government implement the majority website policy which is their obstacle is the source of human and budgeting. That every village government has its own problems such as education and health infrastructure Some villages in Bojonegoro district do not budget funds for the implementation of the village website because it has the focus of the development to be achieved while in another part of the Bojonegoro District Government Activate Windows to Set to.

Keywords: Public Information Openness, village website, Bojonegoro district

PENDAHULUAN

Pada tahun 1990-an, berkembang paradigma baru dalam memandang tata kelola pemerintahan. Paradigma ini lahir akibat tuntutan dari masyarakat global atas perbaikan dalam menjalankan sistem birokrasi, masyarakat mulai menuntut agar pemerintah tidak terlalu dominan dan memberikan rakyat ruang cukup untuk berpartisipasi dalam roda pemerintahan (Budiati, 2012: 36). Dari cara pandang ini akhirnya muncul *terminology* baru yang disebut sebagai *open government* yang lebih menekankan pada penyelenggaraan negara yang terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Untuk mengembangkan standar yang dapat memandu mewujudkan dan memperluas agenda *open government* di Indonesia, Pemerintah Indonesia melakukan agenda politik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Adanya Undang-undang tersebut akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi.

Teknologi informasi yang telah berkembang semakin pesat akan memudahkan siapa saja dalam mengakses informasi. Kelebihan-kelebihan seperti informasi yang dapat diakses dengan mudah, murah dan cepat menjadi keuntungan tersendiri dengan adanya teknologi informasi. Dalam konteks pemerintahan, Andrianto (2007) mengatakan bahwa digitalisasi akan mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas publik. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui teknologi informasi yaitu dengan adanya Sistem Informasi Desa (SID).

Salah satu Pemerintah Daerah yang mengembangkan Sistem Informasi Desa dalam bentuk *website* desa adalah Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro telah membentuk 6 desa sebagai *pilot project website* desa dan saat ini dari 419 desa 380 diantaranya telah memiliki *website* desa sebagai media informasi publik (DPMD, 2018). Penggunaan teknologi informasi di Kabupaten Bojonegoro mendapat perhatian lebih.

Bukan hanya dalam bentuk *website* desa yang menyajikan informasi, program *website* desa memberikan peran yang lebih besar dalam proses pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro secara optimal. Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui proses yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan

praktik informasi publik melalui pemanfaatan *website* desa (*webdes*).

METODE

Penelitian dilakukan dengan menggunakan strategi studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sehingga bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan penelitian tentang apa (*what*) obyek yang diteliti, tetapi juga menjawab secara menyeluruh tentang bagaimana (*how*) dan mengapa (*why*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait latar belakang, tujuan serta proses yang dilakukan Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan kebijakan *website* desa.

Informan penting dalam penelitian ini antara lain adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Desa serta dari masyarakat desa. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Proses analisis data ini menggunakan empat tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengembangan *Website* Desa Sebagai Media Informasi Desa

Website desa merupakan salah satu media informasi desa yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Apabila mengacu pada RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018 serta Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa, *website* desa merupakan salah satu wadah yang harus ada dalam pemerintahan desa untuk memberikan akses kepada masyarakat desa dalam memperoleh informasi publik. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong pemerintahan yang tertib, terbuka dan akuntabel.

Dari sisi masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan desa. Sebagai salah satu sistem informasi desa *website* desa juga harus mempunyai kualitas informasi yang sesuai standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017. Adapun informasi publik yang harus tertera dalam *website* desa adalah sebagai berikut:

Informasi tentang Alokasi Dana Desa (ADD), APBDes, Potensi Desa, Kegiatan dan agenda Pemerintah Desa, Laporan keuangan Pemerintah Desa, Informasi tentang pemberdayaan, kemasyarakatan dan pembangunan desa. Jadi setelah turunnya regulasi tentang sistem informasi desa pada tahun 2017, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lebih menekankan pada penguatan pengelolaan konten. Tetapi bukan berarti

semua desa di Kabupaten Bojonegoro telah memiliki *website* desa karena sebenarnya memang tidak mudah dalam menerapkan *website* desa. Karena program ini berhubungan dengan teknologi informasi. Jadi hambatan seperti jaringan yang kurang stabil hingga terbentur dengan anggaran menjadi kendala dalam penerapan *website* desa.

a) Bimbingan dan Pelatihan

Dalam rangka menerapkan kebijakan *website* desa di Kabupaten Bojonegoro Dinas Komunikasi dan Informatika tidak bekerja sendiri. Dalam melaksanakan kebijakan ini Dinkominfo bekerja sama mulai beberapa lembaga lain. Dalam bimbingan dan pelatihan harus ada ahli *website*, ahli jaringan, dan ahli menulis berita yang biasanya dari kalangan jurnalis. Semua pihak yang terlibat dalam aplikasi *website* desa mempunyai perannya masing-masing dalam menyampaikan informasi.

b) Pendampingan

Setelah proses bimbingan dan pelatihan selesai dilaksanakan maka yang harus diperhatikan selanjutnya adalah pendampingan. Pemerintah sebagai fasilitator dalam program *website* desa memiliki kewajiban untuk memberikan pelatihan dan selanjutnya pendampingan dalam pengelolaan *website* desa.

c) Monitoring

Dalam menerapkan suatu kebijakan pasti akan dilakukan monitoring untuk melihat sejauh mana kebijakan yang diterapkan telah berjalan. Demikian dengan Kabupaten Bojonegoro, dalam menerapkan kebijakan *website* desa juga dilakukan monitoring kebijakan. Tak semua desa yang telah mendapatkan bimbingan dan pelatihan *website* desa akan mengimplementasikan kebijakan *website* desa.

Pelaksanaan Program Website Desa Di Kabupaten Bojonegoro

Setiap desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro dalam mengimplementasikan kebijakan *website* desa memiliki hambatan dan hasil yang bervariasi. Dari hasil wawancara dengan berbagai aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti bimbingan program *website* desa terdapat beberapa kesimpulan yang bisa diperoleh. Bagi pemerintah desa yang tidak mengimplementasikan kebijakan *website* mayoritas yang menjadi hambatan mereka adalah sumber daya manusia dan anggaran.

Selain itu setiap pemerintah desa memiliki permasalahan masing-masing seperti infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan. Beberapa desa yang ada di kabupaten Bojonegoro tidak menganggarkan dana untuk implementasi *website* desa karena memiliki fokus pembangunan yang ingin dicapai. Dengan demikian seharusnya setiap desa wajib untuk menganggarkan dana untuk kebutuhan *website* desa, tidak dialokasikan. Mereka melihat *website* desa belum menjadi media

informasi desa yang harus diimplementasikan, mereka beranggapan bahwa adanya baliho sudah cukup digunakan sebagai media informasi desa karena tak memerlukan dana untuk setiap bulannya.

Bagi desa yang mengimplementasikan kebijakan *website* desa mereka berpendapat bahwa *website* desa memiliki fungsi lebih dari sekedar media informasi desa. Dengan adanya *website* desa menurut mereka mampu membawa pelayanan publik semakin dekat dengan masyarakat. Selain pelayanan publik *website* desa memiliki kegunaan sebagai media promosi produk unggulan desa. Melihat adanya peluang yang berguna untuk pembangunan desa, maka mereka merasa perlu untuk mengimplementasikan *website* desa selain sebagai media informasi desa.

Dampak Website Sebagai Sistem Informasi Desa

Perspektif Dinas Komunikasi dan Informatika:

Membangun Kepercayaan Masyarakat Melalui Akses Informasi Yang Mudah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan *website* desa mengatakan bahwa adanya kebijakan *website* desa akan memberikan beberapa keuntungan. Salah satunya adalah pemerintah desa akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat, dengan adanya kepercayaan dari masyarakat diharapkan pembangunan yang dilakukan minim hambatan.

Adanya kepercayaan masyarakat dalam pemerintahan akan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan. Dengan masyarakat diberikan akses informasi publik secara otomatis masyarakat akan melakukan fungsi *controlling*. Adanya pengawasan dari masyarakat dalam proses pemerintahan akan meminimalkan tindakan *manipulative* dari aparatur pemerintahan.

Perspektif Pemerintahan Desa: Website Desa Sebagai Media Promosi Desa

Bagi Pemerintah Desa Deru adanya *website* desa tak hanya sekedar menjadi media informasi desa. *Website* desa telah mendorong berbagai program pemberdayaan di Desa Deru. Dari beberapa program pemberdayaan di Desa Deru telah menghasilkan beberapa produk unggulan desa. *Website* desa menjadi wadah Pemerintah Desa Deru untuk mempromosikan produk unggulan desa.

Dengan adanya *website* desa selain memudahkan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik ternyata juga menyimpan potensi lain. *Website* desa mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya dipasarkan melalui *website* desa. Dengan melaksanakan kebijakan *website* desa, pemerintah desa telah melaksanakan prinsip pelayanan sekaligus pemberdayaan.

a. Perspektif Masyarakat Desa: Belum Perlu Untuk Dilaksanakan

Disisi lain, Kebijakan *website* desa menurut salah satu masyarakat Kabupaten Bojonegoro Andy masih belum perlu untuk diterapkan. Menurutnya masyarakat desa lebih banyak mengetahui informasi melalui spanduk atau baliho yang berada di area balai desa. Adanya *website* desa sebagai sistem informasi desa perlu dipertimbangkan kembali.

Masyarakat belum terlalu akrab untuk menggunakan *website* desa sebagai sistem informasi desa. Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh Lilik salah satu ketua RT yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Menurut Lilik masyarakat desa yang mayoritas sebagai petani kurang tepat apabila pemerintah menerapkan *webdes* sebagai sistem informasi desa. Lilik menambahkan bahwa untuk berbagi informasi lebih cocok apabila lewat pertemuan seperti 'jandom' atau lewat spanduk.

Andy dan Lilik menganggap bahwa adanya kebijakan *website* desa sebagai media informasi belum dibutuhkan oleh masyarakat. Hal lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah karakter masyarakat desa. Masyarakat desa lebih membutuhkan hal-hal yang lebih penting seperti perbaikan jalan. Menurut mereka sekalipun kebijakan ini tetap dilaksanakan oleh pemerintah desa maka yang akan terjadi adalah media *webdes* menjadi tidak terpakai atau tidak ada yang mengakses.

Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat (IDFos): Kebijakan Website Desa Perlu Dianalisis Lebih Lanjut

Tetapi yang harus digaris bawahi adalah penerapan *website* desa sebagai sistem informasi desa dirasa kurang bermanfaat. Menurut Joko Hadi data maupun informasi yang disajikan dalam *website* desa tidak banyak, jenis, kualitas dan datanya tidak cukup bagus. Dari sisi permintaan informasi juga tidak banyak, karena apabila menggunakan *website* harus ada data internet. Selain data internet yang menjadi perkara penting selanjutnya adalah perihal kebutuhan

Joko Hadi menekankan bahwa dalam mengelola *website* desa isi pesannya harus beragam dan disesuaikan dengan karakteristik desa supaya bisa lebih menarik. Dimana tujuannya untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuannya. Tetapi dalam praktiknya menurut Joko Hadi kebijakan *website* desa cenderung digunakan sebagai penggugur kewajiban, masyarakat belum banyak yang merasakan manfaat dari adanya kebijakan *website* desa. Padahal seharusnya kebijakan itu harus efisien dan efektif, sehingga apa yang diinginkan masyarakat dapat tercapai.

PENUTUP

Kesimpulan

Kabupaten Bojonegoro mengembangkan *website* desa bertujuan agar terselenggaranya pemerintahan desa yang baik (*open government*). Masyarakat desa dapat memperoleh informasi publik seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, APBDes, kegiatan dan kinerja pemerintah desa, potensi desa, dan pemberdayaan masyarakat melalui *website* desa. Namun pengembangan yang dilakukan Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan kebijakan *website* desa perlu dilakukan review. Dari 28 kecamatan yang terdiri dari 419 desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro hanya 102 *website* desa yang aktif dan 317 diantaranya tidak aktif. Mengingat tidak semua desa mampu melaksanakan kebijakan *website* desa. Kendala-kendala seperti infrastruktur, anggaran dan sumber daya manusia harus mampu dipecahkan secara bersama-sama.

Saran

Dalam mengembangkan kebijakan *website* desa di Kabupaten Bojonegoro pemerintah harus melakukan review, mengumpulkan data dan masalah kemudian dianalisis kemudian mencari alternatif pemecahan masalah. Review menjadi hal yang penting dan perlu melibatkan banyak pihak. Karena selama ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro hanya melakukan review melalui index keterbukaan tetapi tidak ada pemecahan masalah.

Apabila pemerintah desa tidak siap dengan adanya kebijakan *website* desa maka baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat harus menyediakan segala fasilitasnya terlebih dahulu, seperti infrastruktur karena hal tersebut menjadi tugas pemerintah. Pemerintah yang telah diberikan kuasa untuk mengelola kegiatan pemerintahan harus memastikan setiap kebijakan yang akan diterapkan dapat berjalan. Dari sisi masyarakat juga harus dilihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Budiati, Lilin. (2012). *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- McQuail, Denis. (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Moelong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhlizi, Arfan Faiz. (2017). *Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Partisipasi Publik Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik*. Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Sutiono, Agus dkk. (2011). *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Medika.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Uno, Hamzah B dan Lamatenggo Nina. (2011). *Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

